
PENCATATAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (Desa Karangreja, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap)

Negina Kencono Putri¹
Siti Maghfiroh^{2*}

¹Universitas Jenderal Soedirman; negina.putri@unsoed.ac.id

²Universitas Jenderal Soedirman; firoh.sutanto@gmail.com; corresponding author

Abstract

Public sector accounting is an information system that identifies, organizes, and communicates information on the economy and public sector entities. Public economic information is useful for decision-making on: (1) Allocation of economic resources, (2) Public services, (3) Performance of public sector organizations, (4) Assessment of liquidity capabilities, (5) Distribution of income and economic stability. Therefore, it is important for government institutions to understand how public sector accounting to achieve accountability of financial statements.

This service was carried out in Karangreja Village, Cipari District, Cilacap Regency, which was attended by all karangreja village officials, along with PKK mothers from Karangreja Village. The purpose of implementing this service is to (1) provide an understanding of how public sector accounting in Indonesia, (2) Provide accounting skills to all PKK staff and mothers. After being given an understanding and skills in accounting in the public sector, it is hoped that it can be applied and can increase the accountability of the financial statements of Karangreja village.

Keywords: Public sector accounting, Karang Reja Village

PENDAHULUAN

Pengertian desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat Desa/Kelurahan dan keberhasilan Pembangunan Nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa yang mengatur tentang pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan optimal. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa) beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki dalam hal ini yaitu asset yang dimiliki pemerintah desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, bahwa Aset Pemerintah Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli

atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa), kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil kerjasama desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan asset lainnya milik desa. Dari pengertian tersebut jelas bahwa asset desa merupakan murni property milik Pemerintah Desa bukan perorangan, sehingga wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dan pemerintah di atasnya. Untuk itu asset desa diperlu di kelola dengan baik untuk menjaga asset desa dan akuntabilitas (pertanggungjawaban asset desa). Agar Pengelolaan aset Desa dapat dilaksanakan dengan baik, harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur pengelolaan barang yang memadai. Hasil dari pengelolaan tersebut akan dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan standar akuntansi.

Akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan alternatif arah tindakan. Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Akuntansi sektor publik merupakan sebuah system informasi yang mengidentifikasikan, mengatur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi dan entitas sektor publik. Informasi ekonomi sekor publik berguna untuk pengambilan keputusan tentang:

- Alokasi sumber daya ekonomi
- Pelayanan publik
- Kinerja organisasi sector publik
- Penilaian kemampuan likuiditas
- Distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi

Sementara itu, keuangan sektor publik (pemerintahan) adalah semua hak dan kewajiban pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka diperlukan adanya kompetensi terkait akuntansi sector public bagi perangkat desa, khususnya Desa Karangreja, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Permasalahan yang ada saat ini di desa Cipari adalah ; Kurangnya pemahaman dan kemapuan dari perangkat desa untuk penyelenggaraan akuntansi yang sesuai standar. Oleh karena itu tujuan dilaksanakannya pengabdian ini adalah untu: (1) Memberikan Pemahaman mengenai akuntansi Sektor Publik, (2) Meningkatkan ketrampilan akuntansi sector public bagi perangkat desa karangreja.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di Desa karangreja, Kecamatan Cipari, dilaksanakan dengan metode Cerama dan praktek.

1. Metode Ceramah

Ceramah adalah pidato yang disampaikan oleh seorang pembicara di depan sekelompok pengunjung. Ceramah pada hakikatnya adalah proses transfer informasi dari pengajar

kepada sasaran belajar. Dalam proses tranfer informasi ada tiga elemen penting, yaitu pengajar, materi dan sasaran belajar. Metode ceramah efektif digunakan untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Ceramah digunakan pada sifat sasaran sebagai berikut, yaitu sasaran belajar mempunyai perhatian yang selektif, sasaran belajar mempunyai lingkup perhatian yang terbatas, sasaran belajar memerlukan informasi yang kategoris dan sistematis, sasaran belajar perlu menyimpan informasi, sasaran belajar perlu menggunakan informasi yang diterima.

2. Metode Praktek

Metode praktik dibagi menjadi dua yakni metode praktik terbimbing dan praktik mandiri. Praktik terbimbing merupakan metode praktik dalam pembelajaran, guru memberikan umpan balik agar siswa mengetahui cara praktik sesuai dengan materi yang telah dijelaskan. Sedangkan praktik mandiri yakni metode pembelajaran dengan memberikan kesempatan siswa untuk melakukan praktik secara mandiri. Dari berbagai teori diatas dapat ditegaskan bahwa metode praktik adalah suatu teknik pembelajaran yang memiliki tujuan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan menerapkan keterampilan yang telah dimiliki peserta didik dalam suatu kegiatan nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SISTEM PENCATATAN AKUNTANSI

Akuntansi adalah sistem yang merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Suatu system mengolah masukan (input) menjadi keluaran (output). Input system akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan. Sistem pencatatan akuntansi itu sendiri terdiri dari 2 bentuk yaitu:

1) Pembukuan Tunggal (Single Entry)

Sistem pencatatan single Entry sering disebut juga dengan system tata buku tunggal atau tata buku saja.. Dalam system ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat secara tunggal (tidak berpasangan). Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Akan tetapi sistem ini memiliki kelemahan, antara lain kurang lengkap untuk pelaporan karena hanya dapat melaporkan saldo kas, dan tidak dapat melaporkan utang, piutang dan ekuitas dana. Juga sulit untuk melakukan control transaksi, akibatnya sulit menelusuri kesalahan pembukuan yang terjadi.

2) Pembukuan Berpasangan (Double Entry)

Sistem pencatatan double entry juga sering disebut system tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi akan dicatat secara berpasangan. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan kredit. Sisi debit ada di sisi kiri yang berisi kekayaan atau asset organisasi, sedangkan sisi kredit berada di sebelah kanan yang berisi kewajiban dan ekuitas dana.

Dengan model persamaan akuntansinya sebagai berikut:

$$\text{ASSET} = \text{KEWAJIBAN} + \text{EKUITAS DANA}$$

Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar tersebut.

JENIS-JENIS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi Berbasis Anggaran

Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang mencatat, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan transaksi berdasarkan anggaran pendapatan ataupun belanja. Sisten akuntansi ini memasukkan jumlah yang dianggarkan dan jumlah actual . Kendala utama perhitungan system akuntansi anggaran adalah kompleksitas penerimaan dan pengeluaranyang dianggarkan. Untuk menyederhanakan kerumitan ini, maka dilakukan perbandingan yang sistematis dan berkelanjutan antar angka actual dan angka anggaran, tanpa melalui proses penjurnalan anggaran, melainkan cukup dengan data anggaran yang ada dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Akuntansi Berbasis Kas

Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukuran pada saldo kas atau perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dengan kas yang dikeluarkan. Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban.

Akuntansi Berbasis Akrua

Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atas kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus system akuntansi ini pada pengukuran sumber daya pada suatu entitas. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aktiva dan kewajiban. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, akuntansi pemerintahan (sector publik) menggunakan akuntansi berbasis akrual.

SIKLUS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi. Adapun tahapan siklus akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pencatatan

Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.

2. Tahap Penggolongan

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

3. Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja.

4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari sector publik yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan merupakan output akhir dari proses akuntansi yang dilaksanakan di sektor publik. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi

anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya para pengguna laporan keuangan.

Membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran

Laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dibandingkan dengan anggarannya. Perubahan untuk suatu tahun anggaran tertentu.

2. Laporan Neraca (Kekayaan)

Laporan ini menyajikan kekayaan sector publik yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki dengan jumlah kewajiban sampai dengan tanggal 31 Desember suatu tahun.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran dan neraca harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

KESIMPULAN

Dominasi pemerintah (sector publik) dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa diabaikan. Dari proporsional rata-rata anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagian besar dihasilkan oleh mekanisme sector publik. Oleh karena itu pengelolaan anggaran memerlukan suatu system akuntansi yang sama untuk proses penilaian kinerja dan pengambilan keputusan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, akuntansi pemerintahan (sector publik) menggunakan akuntansi berbasis akrual. Dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual diharapkan informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aktiva dan kewajiban. Dari hasil pengabdian ini rata-rata dari perangkat desa karangreja yang mengikuti, meningkat kemampuan dan ketrampilannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Atas Terselenggaranya kegiatan ini dengan baik, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- (1) Para Mahasiswa KKN UNSOED yang membantu menyiapkan acara dari awal sampai selesai
- (2) Kepala Desa Karangreja, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap
- (3) Seluruh Peserta Yang sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir.

DAFTAR PUSTAKA

Fuad, Ramli. 2014. *Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

IAI-KASP.2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa

Tanjung, Abdul Hafiz. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Penerbit Alfabeta. Bandung